



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu wujud Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kepada publik atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Kesehatan di Tahun Anggaran 2023.

Selain itu laporan ini juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai dan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun mendatang. Pada Tahun 2023 untuk mendukung pembangunan kesehatan dilaksanakan beberapa program prioritas dan program lainnya yang secara sinergis dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pembangunan kesehatan juga dilakukan melalui upaya peningkatan akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan peningkatan Kapasitas kelembagaan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak khususnya mengenai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Kami menyadari bahwa isi laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Makassar, 12 Februari 2024



Dr. dr. H. M. SHAQ ISKANDAR, M.Kes, MM, MH
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 19720522 200012 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Kedudukan.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Ketersediaan Tenaga ASN.....	4
E. Aspek Strategis	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja.....	17
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
D. Rencana Anggaran TA. 2023	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian IKU Tahun 2023.....	21
B. Capaian Kinerja Sasaran.....	22
C. Realisasi Anggaran.....	60
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	64
B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja.....	65
 LAMPIRAN	
1. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran PK Tahun 2023	
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
3. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)	

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
II. 1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	15
2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	16
3 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	17
4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	17
5 Rencana Belanja APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan TA.2023.....	18
6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Dinas Kesehatan.....	19
Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2023	
III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
2 Skala Nilai Pencapaian Kinerja IKU.....	21
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	
3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	22
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1	
4 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	23
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	
5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka.....	23
Menengah dan Target Nasional Capaian Kinerja Sasaran 1	
6 Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	24
7 Persentase Temuan Material Tahun 2021-2023.....	27
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	
8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung Sasaran 1.....	29
9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	36
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 28	
10 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	37
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	
11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	37
dan Target Nasional Capaian Kinerja Sasaran 2	
12 Angka Kematian Ibu di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.....	39
13 Angka Kematian Bayi di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023.....	42
14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung Sasaran 2.....	50
15 Situasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2023 dan UPT.....	62
IV. 1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	64

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	Halaman
III. 1 Tingkat Capaian IKU Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	21
2 Kematian Ibu di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	39
3 Kematian Bayi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	40
4 Kematian Neonatal di Kabupaten/Kota..... Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	41
5 Kematian Post Neonatal di Kabupaten/Kota..... Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	42
6 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.....	43
7 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	44
8 Persentase Anak Usia 0-59 bulan yang Ditimbang di Posyandu (D/S)..... di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	45
9 Cakupan ASI Eksklusif Anak Usia 0-6 bulan di 24 Kabupaten/Kota..... Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	46
10 Cakupan Remaja Putri Mengonsumsi Tablet Penambah Darah..... di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Struktural Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

➤ Kepala Dinas Kesehatan

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kepala Dinas Kesehatan adalah membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah”

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sumber daya kesehatan.

Selain itu Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan didukung oleh sebanyak 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPT RSUD Labuang Baji serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPT RSUD Haji serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPT RSKD Dadi serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPT RSUD Sayang Rakyat serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPT RSKDIA Pertiwi serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPT RSKDIA Siti Fatimah serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Gigi dan Mulut dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPT RSKD Gigi dan Mulut serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit (RS) Regional La Mappapenning Bone dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPTD RS Regional La Mappapenning Bone serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transfusi Darah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPT Transfusi Darah serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Daerah serta menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat (KESMAS) :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) :
 - a. Seksi Penyakit Menular
 - b. Seksi Penyakit Tidak Menular
5. Bidang Pelayanan Kesehatan (YANKES) :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
 - b. Seksi Kerjasama dan Kesehatan Rujukan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK):
 - a. Seksi Alat Kesehatan
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan:
 - a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji
 - b. UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji
 - c. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi
 - d. UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat
 - e. UPT Rumah Sakit Daerah Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi
 - f. UPT Rumah Sakit Daerah Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatimah
 - g. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Gigi dan Mulut
 - h. UPTD Rumah Sakit Regional La Mappapenning
 - i. UPT Transfusi Darah (UTD)
 - j. UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Daerah (Labkesda)

D. KETERSEDIAAN TENAGA ASN/NON ASN

Jumlah tenaga yang tersedia di Dinas Kesehatan dan UPT, sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan
 1. Jumlah total ASN : 281 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 17 orang
 - Jumlah tenaga Fungsional : 133 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 131 orang
 - Tenaga PPPK : 26 orang
 2. Jumlah total honorer : 40 orang

b. UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji

1. Jumlah total ASN : 528 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 13 orang
 - Jumlah tenaga Fungsional : 421 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 87 orang
 - PPPK : 7 orang
2. Jumlah total honorer : 229 orang

c. UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji

1. Jumlah total ASN : 450 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 13 orang
 - Jumlah tenaga Fungsional : 380 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 57 orang
 - PPPK : - orang
2. Jumlah total honorer : 179 orang

d. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi

1. Jumlah total ASN : orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 12 orang
 - Jumlah tenaga Fungsional : 369 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 17 orang
 - Tenaga PPPK : -
2. Jumlah total honorer : 167 orang

e. UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Sayang Rakyat

1. Jumlah total ASN : 245 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 14 orang
 - Jumlah tenaga Fungsional : 205 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 26 orang
 - Tenaga PPPK : -
2. Jumlah total Non ASN : 111 orang

f. UPT Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA) Pertiwi

1. Jumlah total ASN : 211 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 4 orang
 - Sub Koordinator : -
 - Jumlah tenaga Fungsional : 170 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 37 orang
 - Tenaga PPPK : -
2. Jumlah total honorer : 57 orang

g. UPT Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKDIA) Sitti Fatimah

1. Jumlah total ASN : 175 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 10 orang
 - Sub Koordinator : -
 - Jumlah tenaga Fungsional : 133 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 32 orang
 - Tenaga PPPK : -
2. Jumlah total honorer : 88 orang

h. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Gigi dan Mulut :

1. Jumlah total ASN : 95 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 4 orang
 - Jumlah tenaga Fungsional : 75 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 13 orang
 - Tenaga PPPK : 3 orang
2. Jumlah total honorer : 24 orang

i. UPTD Rumah Sakit Regional La Mappapenning :

1. Jumlah total ASN : 57 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 14 orang
 - Jumlah tenaga Fungsional : 32 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 39 orang
 - Tenaga PPPK : 4 orang
2. Jumlah total honorer : 114 orang

j. UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah (Labkesda) :

1. Jumlah total ASN : 143 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 4 orang
 - Jumlah tenaga Fungsional : 103 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 32 orang
 - Tenaga PPPK : 4 orang
2. Jumlah total honorer : 40 orang

k. UPT Transfusi Darah (UTD) :

1. Jumlah total ASN : 36 orang
 - Jumlah tenaga Struktural : 4 orang
 - Jumlah tenaga Fungsional : 15 orang
 - Jumlah tenaga Pelaksana : 17 orang
 - Tenaga PPPK : - orang
2. Jumlah total honorer : 27 orang

E. ASPEK STRATEGIS

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Pencapaian kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan misi pertama dan misi keempat. Misi pertama dilaksanakan dengan tujuan Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah melalui peningkatan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur dan peningkatan Kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya misi keempat dilaksanakan dengan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), kualitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK), mutu kefarmasian dan alat kesehatan serta peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.

Untuk menilai peningkatan capaian kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan yaitu dengan menilai Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang kesehatan yaitu Indeks Kesehatan. Penilaian Indeks Kesehatan merupakan representatif dari Indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Meningkatnya UHH di suatu wilayah otomatis juga memberikan nilai ungkit terhadap indeks kesehatan di wilayah tersebut. Pencapaian Indeks Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Data BPS terakhir memperlihatkan Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai angka 78,80 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 (78,42) dan telah melampaui angka yang ditargetkan (77,86) atau persentase capaian sebesar 101,21%. Sedangkan Pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Sulawesi Selatan tahun 2023 mencapai angka 71,22 tahun dan telah mencapai target yang ditetapkan (70,80 tahun) dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi dua tahun sebelumnya yaitu 70,97 tahun pada tahun 2022 dan 70,66 Tahun pada Tahun 2021.

Salah satu program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan kesehatan yaitu penanganan stunting dan gizi buruk. Dalam rangka penurunan prevalensi balita stunting di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan kegiatan “Pappadeceng Gizi”, dimana program perbaikan gizi dilakukan melalui pendampingan tenaga gizi sebagai keberlanjutan pelaksanaan program Aksi Stop Stunting di tahun 2022 dan program Gammara’na di tahun 2021. Pappadeceng Gizi hadir dengan jangkauan sebanyak 120 desa lokus tertinggi prevalensi stunting di 24 Kab/Kota se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini meliputi penempatan tenaga pendamping gizi dan Pemberian Paket intervensi gizi di desa lokus stunting Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini terintegrasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor lainnya melalui Pemberdayaan Keluarga dan masyarakat khususnya keluarga dengan sasaran 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Selain fokus pada intervensi spesifik, Tenaga Pendamping gizi desa juga diharapkan fokus pada upaya keberlanjutan program penurunan stunting di desa melalui pemberian wawasan mengenai pencegahan stunting antara tenaga pendamping gizi desa dengan tokoh masyarakat, kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), organisasi kemasyarakatan, lintas sektor dan program di desa.

Di bidang Pelayanan Kesehatan, penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga terus ditingkatkan baik dari kualitas maupun kuantitasnya, dengan mempertimbangkan akses kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah Puskesmas sebagai sarana upaya pelayanan kesehatan primer dapat terjangkau oleh masyarakat dan merata sampai di daerah terpencil. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 jumlah Puskesmas di Sulawesi Selatan sebanyak 474 unit, yang terdiri dari 322 Puskemas Perawatan dan 152` Non Perawatan. Keberadaan Puskesmas tersebut didukung oleh

Puskesmas Pembantu sebanyak 1.355 unit dan klinik fasilitas kesehatan terintegrasi sebanyak 318 unit yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Puskesmas sebagai salah satu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) di Sulawesi Selatan difungsikan sebagai *gate-keeper* dalam pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, berkualitas, dan memuaskan masyarakat. Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan Puskesmas dilakukan dengan mekanisme Registrasi dan Akreditasi. Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala minimal lima Tahun sekali, sesuai dengan Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Survey akreditasi Puskesmas yang sebelumnya 3 Tahun sekali menjadi sekali 5 Tahun sekali. Tujuan Registrasi Puskesmas selain mendapatkan legalitas operasional pelayanan juga sebagai persyaratan dalam proses akreditasi. Pada Tahun 2023 semua Puskesmas di Sulawesi Selatan telah mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan.

Pemberlakuan akreditasi Puskesmas adalah untuk membina Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam upaya untuk berkelanjutan memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. Data sampai dengan akhir Tahun 2023 sebanyak 409 Puskesmas telah terakreditasi dan sebanyak 65 Puskesmas sementara melaksanakan proses akreditasi. Selanjutnya dari 409 Puskesmas yang telah terakreditasi 2 Puskesmas terakreditasi Madya, 85 Puskesmas terakreditasi Utama dan 322 Puskesmas terakreditasi Paripurna. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan di tingkat layanan primer dilaksanakan kegiatan Puskesmas Keliling yang berlokasi di Posyandu dengan tujuan untuk memantau status perkembangan balita dan Ibu hamil serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelompok usia lainnya yang tidak dapat mengakses pelayanan ke Puskesmas. Jumlah Posyandu yang tercatat sampai dengan tahun 2023 sebanyak 10.263 unit.

Kegiatan sinergitas lainnya di tingkat layanan primer yang dilakukan adalah PIS-PK (Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga). PIS-PK adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang terdiri atas 12 indikator, dengan 4 indikator prioritas yaitu : Penurunan angka kematian ibu dan bayi, Penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*),

Penanggulangan penyakit menular dan Penanggulangan penyakit tidak menular. Nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) menunjukkan gambaran keluarga sehat, nilai IKS ini juga bias sebagai bahan acuan untuk menentukan kebijakan dan intervensi yang diambil untuk menindaklanjuti permasalahan kesehatan yang dihadapi. Tahun 2023 *progress* pelaksanaan kegiatan PIS-PK pada tahap lanjutan analisis data PIS-PK terintegrasi yang telah dilaksanakan di tahun 2022.

Di tingkat pelayanan kesehatan Rujukan, Pemerintah Sulawesi Selatan juga telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan dari sisi kualitas baik mutu pelayanan dan pengelolaan, penyesuaian kebijakan serta kuantitasnya. Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 124 unit terdiri dari 63 unit milik pemerintah dan 61 unit milik Swasta. Rumah Sakit milik pemerintah terdiri atas Rumah Sakit milik TNI/POLRI sebanyak 7 unit, milik Kementerian Kesehatan sebanyak 3 unit, milik Kementrian lain sebanyak 3 unit, milik Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 41 unit, milik Pemerintah Provinsi sebanyak 8 unit dan Rumah Sakit BUMN sebanyak 1 unit.

Selain itu dengan adanya Sistem rujukan *online* (*Sisrute*) juga merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan berbagai keluhan masyarakat mengenai panjangnya antrian pasien rawat jalan di rumah sakit serta kesulitan mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan medis yang menjadi sorotan berbagai pihak. Diharapkan masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dapat terlayani oleh rumah sakit yang sudah siap sebelumnya karena sudah diatur melalui SISRUTE. Pada Tahun 2023 jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah melakukan aktivasi akun sisrute sebanyak 648 fasilitas dengan tingkat pemanfaatan di rumah sakit sebesar 80%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Akreditasi diselenggarakan secara berkala setiap 4 (empat) Tahun. Akreditasi dilakukan oleh rumah sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) Tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali. Sampai saat ini sebanyak 108 Rumah Sakit telah terakreditasi dengan status akreditasi paripurna sebanyak 98 Rumah Sakit (34%) akreditasi utama sebanyak 7 Rumah Sakit (20%) dan akreditasi madya sebanyak 3 Rumah Sakit (15%).

Faktor pendukung dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu adalah ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan gambaran kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan telah memiliki Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) yang dapat memberikan data dan informasi kondisi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan seutuhnya baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Analisa data yang diambil dari ASPAK dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebutuhan perencanaan

pemenuhan standar, izin operasional dan penetapan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan, penilaian akreditasi serta pengembangan pelayanan di Tahun berikutnya. Capaian kinerja di Tahun 2023 memperlihatkan Persentase layanan Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana di Puskesmas dalam kondisi baik sebesar 94,02% dan Persentase layanan Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik sebesar 93,02%.

Pengalokasian Anggaran di sektor kesehatan juga merupakan tombak dalam Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program antara lain penerapan paradigma sehat, pelaksanaan desentralisasi, mengatasi berbagai kedaruratan, peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui upaya pengintegrasian Kesehatan Gratis ke JKN. Pembiayaan Pembangunan Kesehatan harus memegang prinsip kendali mutu kendali biaya sehingga dengan anggaran yang memadai diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Pengelolaan program integrasi Kesehatan Gratis ke JKN melalui mekanisme pembayaran klaim yang dikelola oleh badan pengelola program JKN dalam hal ini BPJS Kesehatan. Program ini merupakan perimbangan (*sharing*) pembiayaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan pesertanya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam program ini dan telah ditetapkan dengan surat Keputusan masing-masing Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada tahun 2023, sebagai wujud komitmen antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten/Kota telah menganggarkan bantuan dana sharing sebesar Rp 779.520.000.000,- dalam rangka pelaksanaan program kesehatan gratis integrasi ke JKN dengan alokasi pembagian sharing pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 266.875.392.000,- dan pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 512.644.608.000,- dengan jumlah peserta sesuai dengan usulan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 164/II/Tahun 2023 sebanyak 1.866.000 Jiwa. Adapun realisasi penggunaan dana JKN di tahun 2023 sebesar Rp 342.002.322.278,-.

Dari segi ketenagaan, hingga Tahun 2023 pemenuhan rasio tenaga kesehatan di Sulawesi selatan mencapai 27,86/100.000 penduduk, artinya dalam 100.000 penduduk dilayani oleh 27 - 28 orang tenaga kesehatan. Selanjutnya masing-masing rasio ketenagaan sebagai berikut : rasio Dokter Umum sebesar 2,54/100.000 penduduk, rasio dokter spesialis 2,48/100.000 penduduk, rasio dokter gigi 1,073/100.000 penduduk, rasio perawat 14,95/100.000 penduduk,

rasio bidan 7,48/100.000 penduduk, rasio ahli gizi 1,214/100.000 penduduk, rasio ahli sanitasi 1,042/100.000 penduduk, rasio apoteker 1,698/100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan masyarakat 2,345/100.000 penduduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas terdapat 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib terpenuhi sebagai standar pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Adapun 9 jenis tenaga kesehatan yang dimaksud meliputi dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Analis Tenaga Laboratorium Medik (ATLM), Apoteker, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Gizi. Masing-masing tenaga kesehatan ini memiliki standar tersendiri sesuai dengan kriteria Puskesmas (Perkotaan/Pedesaan, Terpencil/Sangat Terpencil). Dari total 475 Puskesmas di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sebesar 373 Puskesmas atau sebesar 78,53% dan masih terdapat 102 Puskesmas atau 21,47% yang belum memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit terdapat 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang yang wajib tersedia di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan, Adapun yang termasuk dalam dokter spesialis dasar adalah spesialis penyakit dalam, anak, bedah, dan obgyn. Sedangkan yang termasuk dalam dokter spesialis penunjang adalah spesialis radiologi, anastesi, dan patologi klinik. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 33 rumah sakit tipe C milik pemerintah, dimana 75% (25 unit) terpenuhi 4 dokter spesialis dasar dan 3 penunjang, dan 25% (8 unit) belum dapat memenuhi kriteria tersebut.

Untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tenaga kesehatan fungsional kesehatan sesuai dengan kompetensinya maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Uji Kompetensi Fungsional Kesehatan dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Tercatat sebanyak 30 Rumpun Jabatan Fungsional yang ada di Sulawesi Selatan dimana sebanyak 21 Rumpun Jabatan Fungsional telah memiliki izin penyelenggaraan uji kompetensi dengan total peserta 3.407 orang dari 8 Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pada pelayanan Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk dukungan Pelaksanaan transformasi sumber daya manusia kesehatan yang diberikan kepada siswa lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat atau mahasiswa kedokteran atau kedokteran gigi yang sedang menjalani program sarjana dan profesi dokter atau dokter gigi yang mana diutamakan berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan

daerah bermasalah kesehatan. Peserta bantuan biaya pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi yang telah menyelesaikan masa pengabdian diusulkan formasinya oleh Pemerintah Daerah pengusul atau Pemerintah Daerah yang mendayagunakan peserta untuk menjadi calon ASN dan pengusulan formasi untuk menjadi calon ASN sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2023 terdapat 40 orang pelamar dari Sulawesi Selatan yang dinyatakan lulus dan memperoleh bantuan biaya Pendidikan.

Berbagai aspek strategis yang dijabarkan di atas diharapkan dapat menciptakan masyarakat Sulawesi Selatan yang mandiri dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan Kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Terwujudnya keadaan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan melainkan multi sektoral termasuk individu dan keluarga.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang didalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah:

**“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,
Inklusif dan Berkarakter”**

Bila melihat rumusan visi di atas, di sektor pembangunan kesehatan dapat diterjemahkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 berupaya untuk mewujudkan kondisi Pemerintahan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mewujudkan kondisi visi tersebut, dirumuskan 5 misi pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan langsung dengan sektor kesehatan dirumuskan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 Tahun adalah, sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

Tujuan:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

MISI 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Tujuan:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel II.1
**TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Persentase Area Perubahan (<i>Reform</i>) Reformasi Birokrasi	Persen (%)	-	100%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,43	70,80

SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Tabel II.2

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Persen (%)	77,24	81
	Persentase Temuan Material	Persen (%)	4	0
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup/ KH	94	90
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH	6	4
	Prevalensi Balita Stunting	Persen (%)	30,59	18,59

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ditetapkan 2 Sasaran yang memuat 5 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

Tabel II.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Persen (%)	81
	Persentase Temuan Material	Persen (%)	0
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup/KH	90
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup/KH	4
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	18,59

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel II.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Proyeksi berdasarkan hasil pencapaian UHH Tahun sebelumnya	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan; BPS (Badan Pusat Statistik)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup/KH	Jumlah kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama dikali 100.000	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan (Laporan Kabupaten/ Kota)
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH	Jumlah kematian bayi (usia 0 – 11 bulan) dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama dikali 1000	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan (Laporan Kabupaten/ Kota)
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	Hasil Survei Nasional	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan; Riskesdas; PSG;

D. RENCANA ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 228.126.681.277,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasional dan Belanja Modal Secara rinci rencana anggaran Belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.5
RENCANA BELANJA APBD-P
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TA. 2023

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	PERSENTASE
1	Belanja Operasi	136.798.296.294,-	47,48%
2	Belanja Modal	151.328.384.983,-	52,52%
JUMLAH		228.126.681.277,-	100%

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6

**ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TA. 2023**

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	86.643.699.148,-	30,07%
	Persentase Temuan Material		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	201.482.982.129,-	69,93%
	Angka Kematian Bayi		
	Prevalensi Balita Stunting		
TOTAL		228.126.681.277,-	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Selama Tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui berbagai kegiatan pendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan daerah, Pemberian Skala Penilaian Terhadap Kinerja Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	$91\% \leq$	Sangat Tinggi	ST
2.	$76\% < 90\%$	Tinggi	T
3.	$66\% < 75\%$	Sedang	S
4.	$51\% < 65\%$	Rendah	R
5.	$< 50\%$	Sangat Rendah	SR

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) *semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:*

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{*})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

- (2) *semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:*

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{*}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

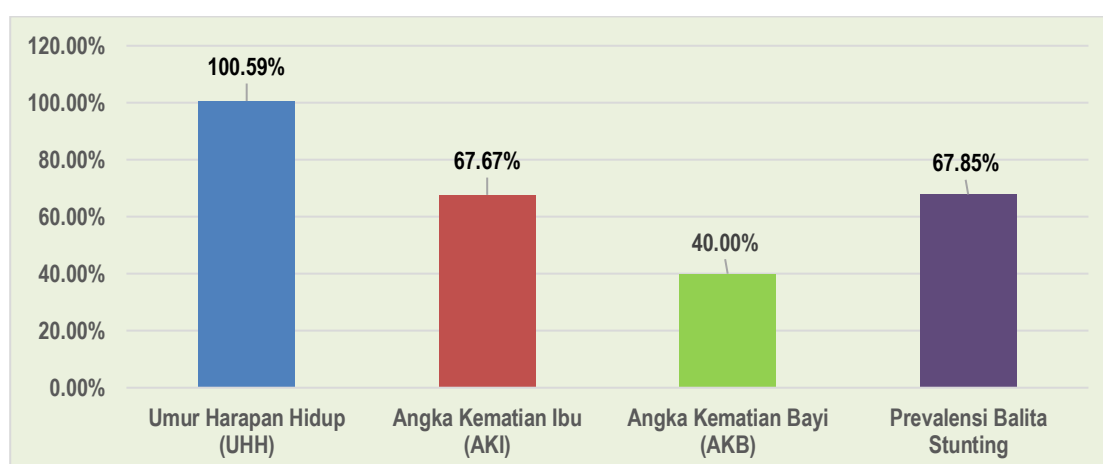
Hasil pengukuran Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan per indikator kinerja pada Tahun 2023 berdasarkan pemberian skala nilai peringkat kinerja di atas, sebagai berikut:

Tabel III.2
**SKALA NILAI PENCAPAIAN KINERJA IKU
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	70,80 tahun	71,22 tahun	100,59%	Sangat Tinggi	ST
	Angka Kematian Ibu	90/100.000 Kelahiran Hidup	133/100.000 Kelahiran Hidup	67,67%	Sedang	S
	Angka Kematian Bayi	4/1.000 Kelahiran Hidup	10/1.000 Kelahiran Hidup	40,00%	Rendah	R
	Prevalensi Balita Stunting	18,59%	27,4%	67,85%	Sedang	S
RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA IKU				70,78%	Sedang	S

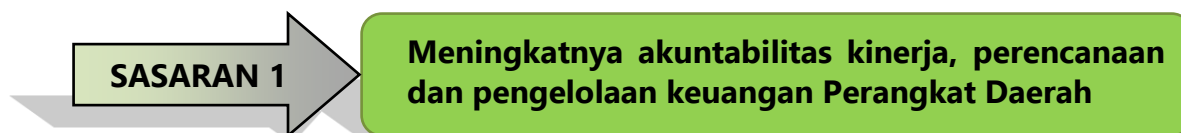
Rata-rata Nilai pencapaian kinerja IKU Tahun 2023 sebesar 70,78% (Sedang) dengan 1 indikator menunjukkan capaian Sangat Tinggi (ST), 2 (dua) indikator menunjukkan capaian Sedang (S) dan 1 (satu) indikator pada predikat kinerja Rendah (R). Pencapaian kinerja IKU Tahun 2023 bila digambarkan dalam sajian grafik akan terlihat seperti berikut ini:

Grafik III.1
**TINGKAT CAPAIAN IKU
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



B. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2 (dua) sasaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja masing-masing memiliki beberapa indikator kinerja. Hasil Pengukuran masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :



Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "**Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif**", dan tujuan "**Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah**". Dalam pelaksanaannya Sasaran ini didukung dengan strategi meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya aparatur dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

Pencapaian kinerja sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.3
**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI
1.	Nilai SAKIP OPD	81	88,00	108,64%	Sangat Tinggi (ST)
2.	Persentase Temuan Material	0%	0%	100%	Sangat Tinggi (ST)
RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA				104,32%	Sangat Tinggi (ST)

Tabel pengukuran pencapaian kinerja di atas menunjukkan rata-rata realisasi capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 1 "**Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**" telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar **104,32%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN (TAHUN)		
		2021	2022	2023
1.	Nilai SAKIP OPD	82,00	88,00	88,00
2.	Persentase Temuan Material	0,02%	0,001%	0%

Hasil Pengukuran kinerja indikator di tahun 2023 dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya menunjukkan terjadi kenaikan capaian kinerja pada indikator Persentase Temuan Material dan terjadi penurunan capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP OPD. Nilai SAKIP yang tertera pada tabel capaian tahun 2023 masih menggunakan nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian Sakip tahun 2023 akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional.

Tabel III.5

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN
TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET NASIONAL
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN		
		CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET NASIONAL
1.	Nilai SAKIP OPD	88,00	81	-
2.	Persentase Temuan Material	0%	0%	-

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah seperti yang terlihat pada tabel di atas, kedua indikator telah mencapai bahkan melebihi target jangka menengah.

Indikator kinerja pada sasaran ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP OPD

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan perolehan hasil evaluasi 88,00 atau kategori **"A" (Memuaskan)**, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel III.6
NILAI EVALUASI SAKIP TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI TAHUN 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	27,60
3	Pelaporan Kinerja	15	14,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	88,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Penilaian SAKIP di Tahun 2022 di atas menggunakan kriteria penilaian baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1.505/VII Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penilaian implementasi SAKIP menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Evaluasi ini diharapkan instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah dapat meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam Renstra masing-masing OPD.

Hasil penilaian SAKIP, diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.

Dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022, terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

- Pengukuran kinerja evaluasi akuntabilitas secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi belum menggunakan bantuan teknologi (aplikasi) sehingga capaian atau progress kinerja belum dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

Beberapa Rekomendasi yang diberikan dari hasil Penilaian SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, antara lain :

- Mengembangkan teknologi informasi (aplikasi) yang digunakan di internal Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempermudah dan mempercepat pengisian serta pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari level staf sampai kepada pimpinan tertinggi maupun untuk kegiatan evaluasi akuntabilitas internal Dinas.

Selanjutnya tindak lanjut yang telah dilaksanakan sekaitan dengan rekomendasi di atas, sebagai berikut :

- Tahun 2023 rekomendasi tersebut di atas telah menjadi bahan pertimbangan dalam pengusulan penganggaran rencana kerja namun saat ini pembangunan kesehatan masih memfokuskan pembiayaan untuk pelaksanaan program prioritas dan penyediaan peralatan kantor pasca musibah kebakaran kantor, sehingga pelaporan data kinerja dipercepat dengan memanfaatkan fasilitas media sosial yang ada. Selain itu pelaporan kinerja berjenjang dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi yang ada yaitu e-kinerja Provinsi Sulawesi Selatan dan e-kinerja BKN.
- Pelaporan kinerja secara berjenjang dengan mengembangkan teknologi informasi direncanakan pada awal tahun 2024 telah terlaksana dengan menggunakan aplikasi pelaporan sektoral secara berjenjang di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT. Untuk progress pengembangan dan tingkat kebutuhan menu aplikasi kinerja sektoral lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini telah dikonsultasikan kepada tenaga IT.

2. Persentase Temuan Material

Temuan material adalah besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang ditemukan dalam pelaksanaan audit yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang melingkupinya atau adanya kemungkinan pertimbangan yang diberikan sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi berubah. Kondisi ini dianggap perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti agar laporan atau informasi yang disajikan pada laporan keuangan OPD menjadi relevan dengan bukti dukung yang diberikan.

Indikator kinerja Persentase Temuan Material ini untuk mengukur persentase jumlah temuan penyimpangan material sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari Tim APIP (Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan). Persentase temuan material Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, masih jauh di bawah angka yang ditargetkan, maksudnya jumlah temuan keuangan masih sangat kecil dan diharapkan hingga periode Renstra berakhir nanti mencapai angka 0%, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.7
PERSENTASE TEMUAN MATERIAL TAHUN 2021-2022
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JUMLAH TEMUAN MATERIAL (Rp)	PERSENTASE (%)
2021	104.526.906.078,-	18.325.000,-	0,02%
2022	221.030.909.677,-	3.072.000,-	0,001%
2023	228.126.681.277,-	0,-	0%

Pada Tahun 2023, jumlah temuan material telah mengalami penurunan dari jumlah tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pengawasan internal dalam pelaksanaan program/kegiatan telah maksimal dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan baik dari sisi administrasi maupun peruntukkan pengelolaan penganggaran. Beberapa rekomendasi hasil audit yang diberikan antara lain perbaikan administrasi pertanggungjawaban kegiatan. Selain itu ketepatan dan keefektifan waktu pengajuan pertanggungjawaban keuangan yang harus diajukan kepada bagian keuangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan alur kas yang direncanakan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Dari hasil evaluasi di atas, selanjutnya dipaparkan faktor penyebab keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini, antara lain :

- 1) Adanya regulasi/kebijakan terkait pelaksanaan program pembangunan kesehatan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- 2) Rekomendasi perbaikan dari hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil Bimbingan Teknis oleh Kemenpan RB dan Biro Organisasi dalam pelaksanaan SAKIP, evaluasi kinerja dan penyusunan laporan kinerja.
- 3) Adanya *Cascading* dan Pohon Kinerja yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pencapaian kinerja.

- 4) Berjalannya penatausahaan keuangan dan verifikator administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) dalam melakukan verifikasi sebelum disetujui pengguna anggaran untuk dibayarkan.
- 5) Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi rutin setiap triwulan dari Tim Inspektorat Provinsi dan Rekomendasi hasil Audit BPK di Tahun sebelumnya dalam pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan dan Asset milik daerah, sebagai faktor koreksi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah dalam meminimalisir terjadinya temuan material.

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Komitmen bersama dalam pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi masih kurang di tingkat internal OPD sehingga pelaksanaan SAKIP/RB dirasakan hanya karena merupakan pemenuhan kebutuhan penilaian dan tidak menjadi budaya dalam OPD.
- 2) Kurangnya pemahaman dan koordinasi pelaksana kegiatan pada proses pengadaan barang dan jasa serta peraturan pertanggungjawaban kegiatan termasuk keterlambatan penyampaian administrasi kelengkapan pertanggungjawaban sehingga memperlambat pelaksanaan proses penyelesaian administrasi keuangan selanjutnya.

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas antara lain:

- 1) Integritas dan penegasa komitmen bersama dalam pelaksanaan SAKIP/RB sehingga pencapaian kinerja lebih optimal
- 2) Penegasan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendasari administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkup internal OPD.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-P TA. 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp 86.643.699.148,- dengan realisasi sebesar Rp 84.285.004.332,- atau 97,28%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,32%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 7,04%. Bila dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap persentase fisik pelaksanaan program/kegiatan, dimana rata-rata persentase realisasi fisik program pendukung sasaran ini sebesar 99,26% dibandingkan dengan persentase keuangan sebesar 99,29%, maka terdapat efisiensi sebesar 1,98%.

Tabel III.8
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
 PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 1**

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	% FISIK	EFISIENSI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	86.442.698.848,-	84.113.351.636,-	97,31%	98,52%	1,69%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	201.000.300,-	171.652.696,-	85,40%	100%	44,32%
	JUMLAH	86.643.699.148,-	84.285.004.332,-	97,28%	99,26%	1,98%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah didukung sebanyak 2 program, 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi**

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melaksanakan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 86.442.698.848,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 201.000.300,- atau 97,31% dan realisasi fisik 98,52%.

Hasil pencapaian indikator kinerja program, antara lain :

- Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik dengan target sebesar 100% dan realisasi 99,81%.
- Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP dengan target sebesar 0% dan realisasi 0%.
- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi 98,42%.

Kegiatan yang mendukung terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Capaian Kegiatan :

- Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 386.225.770,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 248.047.437,- atau 64,22%, dan realisasi fisik 90,38%.
- Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100 %,

Kegiatan ini didukung oleh beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan Target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 247.615.194,- dengan realisasi keuangan Rp 170.960.449,- atau 69,04% dan realisasi fisik 85%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun dan ditetapkan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 13.019.588,- dengan realisasi keuangan Rp 6.558.288,- atau 50,377% dan realisasi fisik 100%
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun dan ditetapkan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 13.885.500,- dengan realisasi keuangan Rp 7.268.300,- atau 52,34% dan realisasi fisik 100%
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Indikator kinerja Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 12.202.600,- dengan realisasi keuangan Rp 3.589.100,- atau 29,41% dan realisasi Fisik 100%
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi

anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 16.585.500,- dengan realisasi keuangan Rp 8.068.900,- atau 48,65% dan realisasi fisik 100%

- 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan sebanyak 6 laporan dan realisasi 6 laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 82.917.388,- dengan realisasi keuangan Rp 51.602.400,- atau 62,23% dan realisasi fisik 100%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator Capaian Kegiatan persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dengan target sebesar 100% dan realisasi 80%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 78.117.394.634,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 77.985.760.100,- atau 99,83%, dan realisasi fisik 100%. dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Indikator Sub Kegiatan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 532 orang/bulan dan realisasi 531 orang/bulan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 77.886.527.482,- dengan realisasi keuangan Rp 77.811.541.948,- atau 99,90% dan realisasi fisik 91,67%.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dengan target 12 dokumen dan realisasi 12 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 20.237.100,- dengan realisasi keuangan Rp 17.839.100,- atau 88,15% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi dengan target 100 dokumen dan 100 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 184.525.076,- dengan realisasi keuangan Rp 135.998.076,- atau 73,70% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 5.171.600,- dengan realisasi keuangan Rp 3.359.600,- atau 64,96% dan realisasi fisik 100%

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun dengan target 19 Laporan dan realisasi 17 Laporan (89,47%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 15.943.176,- dengan realisasi keuangan Rp 13.639.176,- atau 85,55% dan realisasi fisik 100%.
 - 6) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 4.990.200,- dengan realisasi keuangan Rp 3.382.200,- atau 67,78% dan realisasi fisik 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah. Indikator Capaian Kegiatan persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 120.544.474,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 80.373.724,- atau 66,68%, dan realisasi fisik 87,50%. dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Indikator Sub Kegiatan Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 42.375.782,- dengan realisasi keuangan Rp 24.816.742,- atau 58,56% dan realisasi fisik 70%.
 - 2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Indikator Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah di SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi 0 Laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 78.168.692,- dengan realisasi keuangan Rp 55.556.982,- atau 71,07% dan realisasi fisik 75%
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN dengan target sebesar 89% dan realisasi 92%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 1.758.557.626,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp 1.361.862.391,- atau 77,44%, dan realisasi fisik 85%. dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 26 dokumen dan realisasi 24 dokumen. Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.758.557.626,- dengan realisasi keuangan Rp 1.361.862.391,- atau 77,44% dan realisasi 85%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Administrasi umum kantor dengan target sebesar 100% dan realisasi 90%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 2.497.115.614,- dengan realisasi keuangan Rp 1.559.395.485,- atau 62,45%, dan realisasi fisik 96,63%. dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia dengan target 15 paket dan realisasi 8 paket (53,3%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 129.656.288,- dengan realisasi keuangan Rp 35.226.788,- atau 27,17% dan realisasi fisik 35%
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator Sub Kegiatan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 36 paket dan realisasi 31 paket (86%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.589.303.426,- dengan realisasi keuangan Rp 982.744.470,- atau 61,83% dan realisasi fisik 100%
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga. Indikator sub kegiatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket (100%). Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 71.870.000,- dengan realisasi keuangan 50.807.500,- atau 70,69% dan realisasi fisik 100%.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 7 paket dan realisasi 7 paket (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 50.503.900,- dengan realisasi keuangan Rp 43.000.000,- atau 85,14% dan realisasi fisik 100%.

- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD. Indikator Sub Kegiatan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan 1 laporan dan realisasi 1 laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 655.782.000,- dengan realisasi keuangan Rp 447.616.727,- (68,26%) dan realisasi fisik 100%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah Provinsi dengan target sebesar 100% dan realisasi 80%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 364.111.800,- dengan realisasi keuangan Rp 259.574.300,- atau 71,29%, dan realisasi fisik 90%. Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Indikator Sub Kegiatan Jumlah paket mebel yang tersedia sesuai Kebutuhan dengan target 3 paket dan realisasi 3 paket (66,66%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 364.111.800,- dengan realisasi keuangan Rp 259.544.347,- atau 71,29% dan realisasi fisik 90%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 859.878.648,- dengan realisasi keuangan Rp 594.791.941,- atau 69,17% dan realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang tersedia dengan target 12 laporan dan realisasi 12 laporan (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 859.878.648,- dengan realisasi keuangan Rp 594.791.941,- atau 69,17% dan realisasi fisik 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Capaian Kegiatan Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dengan target sebesar 100% dan realisasi 92%. Alokasi

anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 2.338.870.282,- dengan realisasi keuangan Rp 2.023.546.258,- atau 86,52%, dan realisasi fisik 98,19% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target 34 unit dan realisasi 20 unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 414.198.078,- dengan realisasi keuangan Rp 333.074.902,- atau 80,41% dan realisasi fisik 100%.
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.502.122.204,- dengan realisasi keuangan Rp 1.310.301.356- atau 87,23% dan realisasi fisik 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Indikator Sub Kegiatan Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 422.550.000,- dengan realisasi keuangan Rp 380.170.000,- atau 89,97% dan realisasi fisik 90%.

➤ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

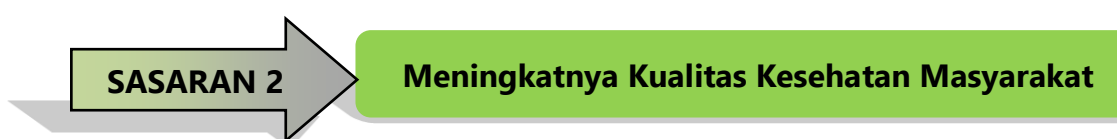
Dalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah” yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi. Indikator Capaian Kegiatan Cakupan ketersediaan data dan informasi dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 201.000.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 171.652.696,- atau 85,40%, dan realisasi fisik 81% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan dengan target

1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 177.000.300,- dengan realisasi keuangan Rp 171.652.696,- atau 96,98% dan realisasi fisik 100%.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi Kesehatan dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 24.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik 100%.



Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **“Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”** dengan tujuan **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**.

Pencapaian kinerja sasaran ini dilakukan dengan strategi meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan serta mengendalikan penyakit. Sasaran ini juga diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.9
**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	Angka Kematian Ibu	90/100.000 KH	133/100.000 KH	67,67%	Sedang (S)
2.	Angka Kematian Bayi	4/1.000 KH	10/1000 KH	40,00%	Rendah (R)
3.	Prevalensi Balita Stunting	18,59 %	27,4%	67,85%	Sedang (S)
RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA				58,50%	Rendah (R)

Tabel pengukuran pencapaian kinerja indikator Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” di atas memperlihatkan ketiga indikator kinerja pada sasaran ini belum mencapai target yang ditetapkan. Faktor penyebab belum tercapainya target akan dijelaskan lebih lanjut pada laporan ini.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN		
		2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu	129/100.000 KH	119/100.000 KH	133/100.000 KH
2.	Angka Kematian Bayi	5/1.000 KH	8/1000 KH	10/1000 KH
3.	Prevalensi Balita Stunting	27,4%	27,2 %	27,4%

Hasil Pengukuran kinerja indikator sasaran ini mengalami penurunan capaian kinerja dimana terjadi peningkatan jumlah kasus kematian ibu dan bayi serta meningkatnya prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Penjelasan pencapaian masing-masing indikator kinerja di atas akan diuraikan lebih lanjut pada Bab ini.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional.

Tabel III.11
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN
TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET NASIONAL
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN 2**

NO.	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN		
		REALISASI TAHUN 2023	TARGET JANGKA	TARGET NASIONAL
1.	Angka Kematian Ibu	133/100.000 KH	90/100.000 KH	184/100.000 KH
2.	Angka Kematian Bayi	10/1000 KH	4/1.000 KH	17,6/1000 KH
3.	Prevalensi Balita Stunting	27,4%	18,59%	16%

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah seperti yang terlihat pada tabel di atas, pencapaian kinerja indikator sasaran ini belum ada yang mencapai target jangka menengah yang ditetapkan, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi lebih tinggi dari pada target jangka menengah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target Nasional maka Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Selatan lebih rendah dari pada target Nasional. Sedangkan indikator Prevalensi Balita Stunting sampai dengan saat ini diakui belum berada di bawah target nasional.

Indikator kinerja pada sasaran ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

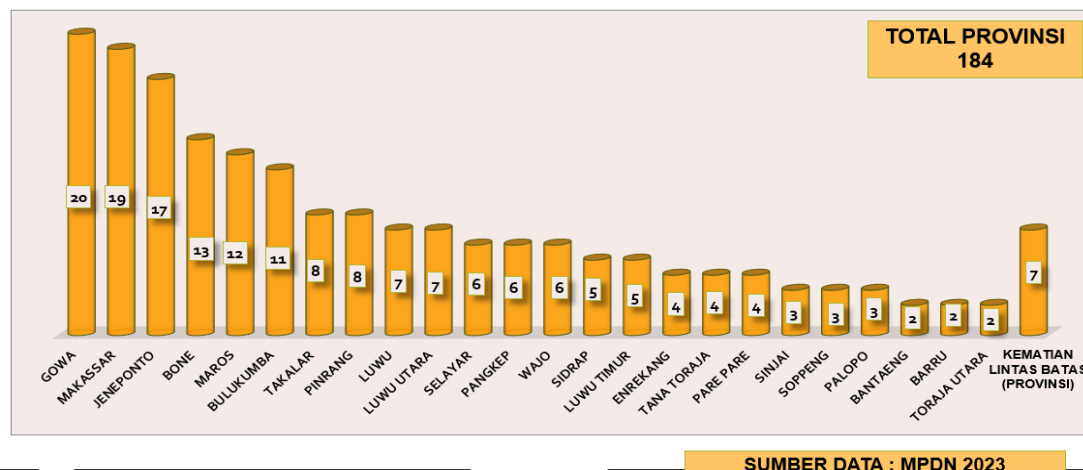
Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah kematian wanita yang terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/*incidental* (ICD 10, WHO).

Informasi mengenai tingginya kasus kematian ibu di suatu wilayah akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi serta meningkatkan derajat kesehatan reproduksi perempuan.

Berdasarkan rekapitulasi data pelaporan Kabupaten/Kota menunjukkan jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 sebanyak 184 kasus dan mengalami peningkatan jumlah kasus sebanyak 10 kasus dari tahun sebelumnya (Tahun 2022 = 174 kasus). Peningkatan jumlah kasus kematian ibu ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan antenatal (masa kehamilan), pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan, serta faktor sosial budaya. Terbatasnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, terutama bagi ibu hamil di Daerah Tertinggal, Terpendek, Terbatasan dan Kepulauan (DTPK) juga turut mempengaruhi peningkatan kasus kematian ibu.

Sebaran kasus jumlah kematian ibu di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.2
**KEMATIAN IBU DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada pada Kabupaten Gowa dengan jumlah 20 kasus kematian ibu. Sedangkan Jumlah kasus kematian ibu terendah ada di Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 2 kasus kematian ibu.

Angka Kematian Ibu diperoleh dengan membagi jumlah kasus kematian ibu sesuai dengan definisi di atas dalam kurun waktu satu Tahun dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama. Penyebab terbanyak kematian ibu adalah Hipertensi dan Perdarahan. Perhitungan AKI di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.12
**ANGKA KEMATIAN IBU DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2019-2022**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Orang	144	133	195	174	184
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	152.680	154.733	151.060	146.184	137.964
AKI per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	per 100.000 KH	94	86	129	119	133

Dari tabel di atas, terlihat dengan meningkatnya jumlah kasus kematian ibu berarti meningkat pula Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Selatan dimana di tahun 2022 sebesar 119/100.000KH menjadi 133/100.000 KH di tahun 2023. Selanjutnya secara terinci permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini akan disebutkan lebih lanjut.

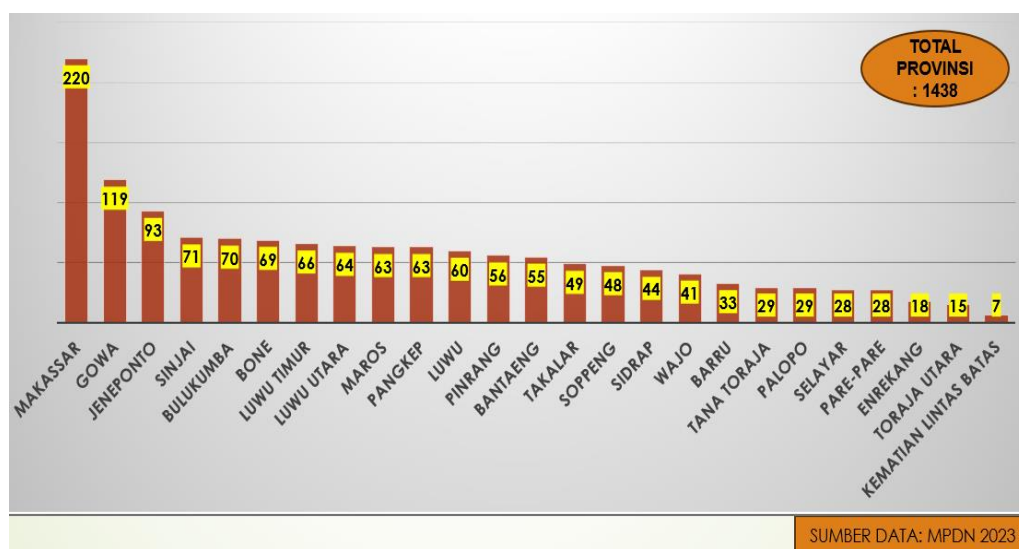
2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi juga merupakan salah satu indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. AKB didefinisikan sebagai Jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun yang terjadi per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu Jumlah kasus kematian bayi erat hubungannya dengan kondisi lingkungan tempat tinggal dan status sosial dari orang tua bayi tersebut.

Pada tahun 2021 Jumlah Kasus kematian bayi di Sulawesi Selatan sebanyak 844 kasus, meningkat menjadi 1.117 kasus di tahun 2022 dan sampai dengan penghujung tahun 2023 Jumlah kasus kematian bayi tetap meningkat menjadi 1.438 kasus. Peningkatan jumlah kasus ini menunjukkan perlunya ditingkatkan upaya yang lebih maksimal dalam menekan jumlah kasus kematian bayi. Kondisi ini diharapkan menjadi rujukan dalam evaluasi pencapaian program kependudukan dan dalam penentuan kebijakan di sektor kesehatan keluarga khususnya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Dapat digambarkan grafik data jumlah kasus kematian bayi (0-1 tahun) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

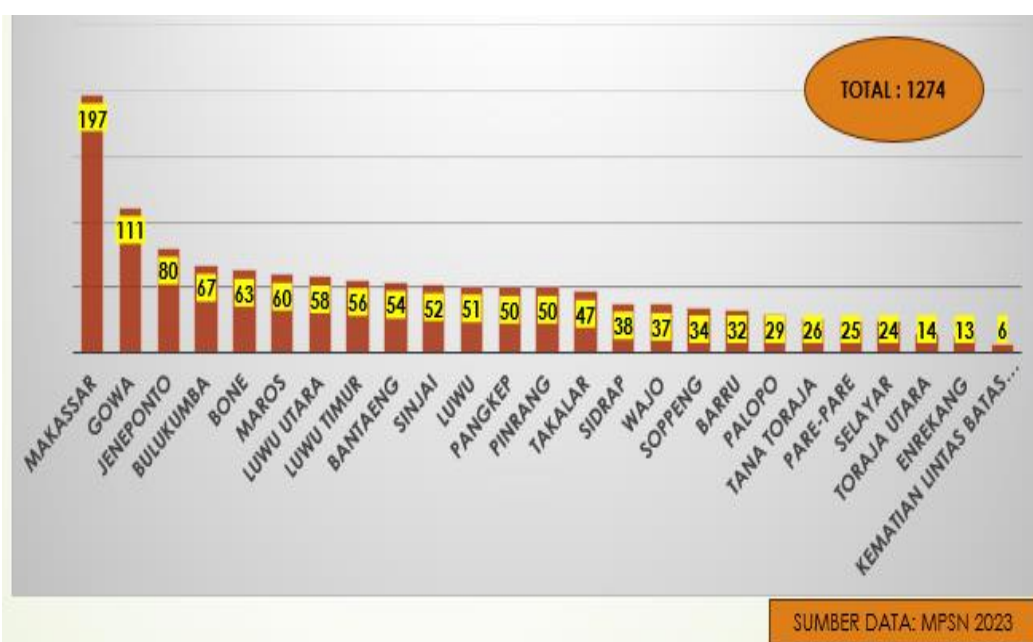
Grafik III.3
**KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian bayi usia 0-1 tahun terbanyak berada pada Kota Makassar sebanyak 220 kasus disusul oleh Kabupaten Gowa sebanyak 119 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian neonatal terendah ada di Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 15 kasus kematian.

Selanjutnya data jumlah kasus kematian bayi neonatal (0-28 hari) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

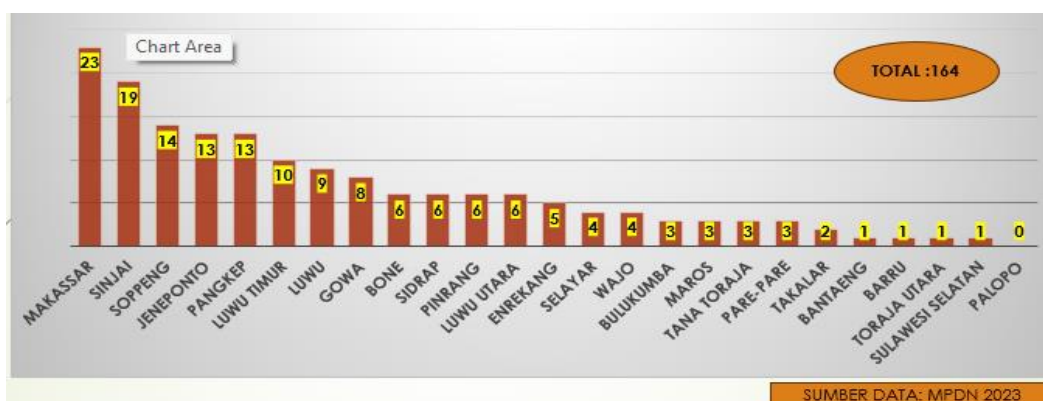
Grafik III.4
**KEMATIAN NEONATAL DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



Dari grafik di atas terlihat jumlah kasus kematian bayi neonatal (0-28 hari) terbanyak berada pada Kota Makassar sebanyak 197 kasus disusul oleh Kabupaten Gowa sebanyak 111 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian neonatal terendah ada di Kabupaten Enrekang dengan jumlah 13 kasus kematian neonatal.

Sedangkan sebaran jumlah kasus kematian Bayi Post Neonatal (29 hari-11 bulan) terbanyak berada pada Kota Makassar sebanyak 23 kasus disusul oleh Kabupaten Sinjai sebanyak 19 kasus. Sedangkan Jumlah kasus kematian post neonatal terendah ada di Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah 1 kasus kematian post neonatal, seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik III.5
KEMATIAN POST NEONATAL DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023



Dari dua grafik kematian bayi di atas, nampak bahwa lebih dari 2/3 kematian bayi itu terjadi pada masa neonatal (usia 0 – 28) hal ini berkaitan dengan kondisi dan kualitas kesehatan ibu pada saat hamil dan melahirkan, kemudian deteksi faktor risiko, kompetensi petugas dan dukungan sarana prasarana untuk penanganan neonatal esensial.

Angka Kematian Bayi diperoleh dengan membagi jumlah kasus kematian bayi sesuai dengan definisi di atas dalam kurun waktu satu Tahun dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama. Perhitungan AKB di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.13
ANGKA KEMATIAN BAYI DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2019-2023

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 Tahun	Orang	919	791	844	1.117	1.438
Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	152.680	154.733	151.060	146.184	137.964
AKB per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Angka (per 1.000 KH)	6	5	5	8	10

Dari tabel di atas, terlihat di tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 321 kasus dimana 2/3 kematian bayiterjadi pada masa neonatal (0-28 hari) yang penyebabnya terbanyak adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia, Penyebab kematian bayi (Post Neonatal) adalah adanya penyakit pneumonia dan diare. Beberapa permasalahan lainnya akan dikemukakan selanjutnya pada poin permasalahan.

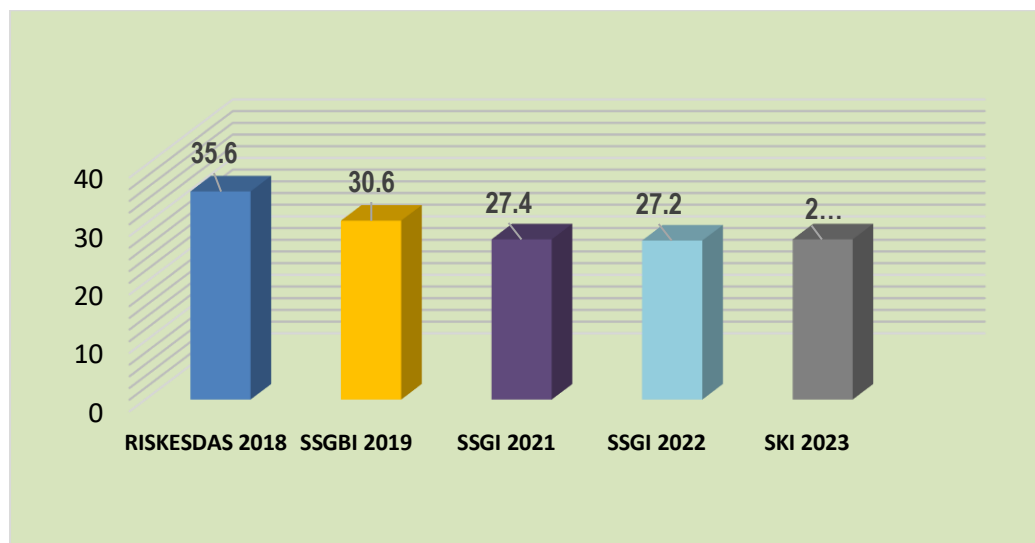
3. Prevalensi Balita Stunting

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) no.2 tahun 2020. Kategori stunting apabila Hasil pengukuran tinggi badan dibandingkan dengan umur kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO. Stunting disebabkan oleh multifaktor dan membutuhkan penanganan multisektoral.

Faktor utama yang menjadi penyebab stunting adalah buruknya asupan gizi dan rendahnya status kesehatan. Pemicu dari kedua faktor penyebab stunting ini adalah: praktek pengasuhan anak yang kurang baik; tidak tersedianya makanan bergizi bagi rumah tangga, Belum optimalnya layanan kesehatan untuk ibu terutama selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk balita kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan trend penurunan, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik III.6
**PREVALENSI BALITA STUNTING
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 – 2023**

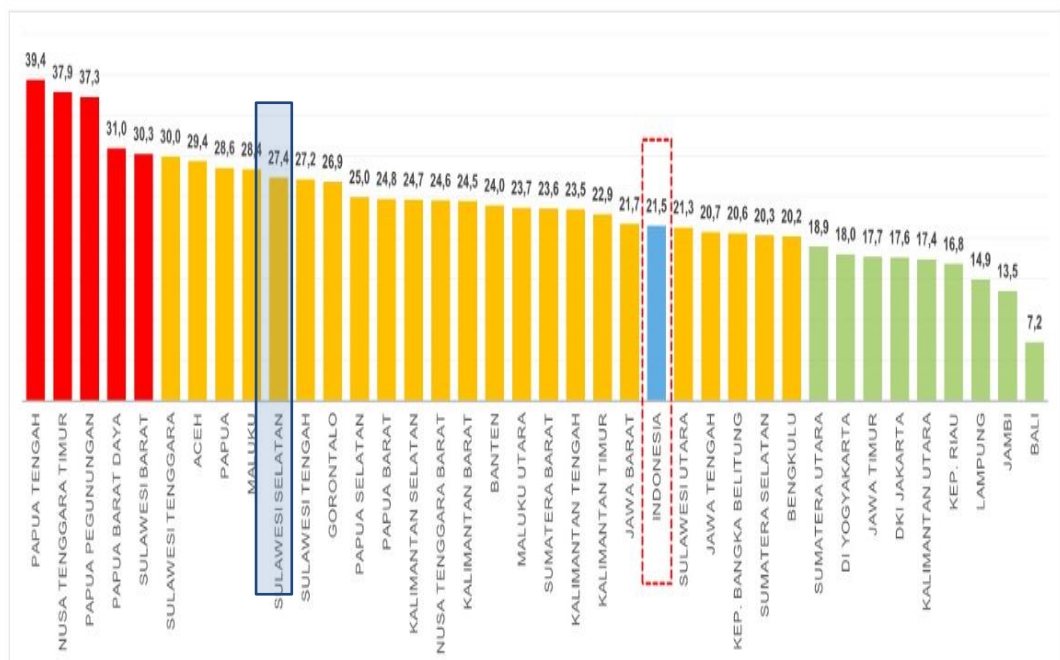


Sumber : Data Survey Riskesdas, SSGI 2018 s/d 2022 dan SKI 2023

Berdasarkan grafik diatas, Data Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, Prevalensi Stunting di Sulawesi Selatan sebesar 35,6%, mengalami penurunan menjadi 30,6% (SSGBI 2019), tahun 2021 menurun menjadi 27,4% (SSGI 2021), tahun 2022 menurun menjadi 27,2% (SSGI) namun pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 27,4% (SKI).

Bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, sebaran Prevalensi Stunting di secara nasional menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik III.7
**PREVALENSI BALITA STUNTING DI PROVINSI SELURUH INDONESIA
TAHUN 2023**



Sumber data SKI tahun 2023

Dari grafik di atas dapat dilihat Provinsi Selatan berada pada peringkat 10 terbawah dan berada pada garis kuning yang melambangkan perlu perhatian yang lebih maksimal lagi dalam mengatasi permasalahan balita stunting di daerah Sulawesi Selatan.

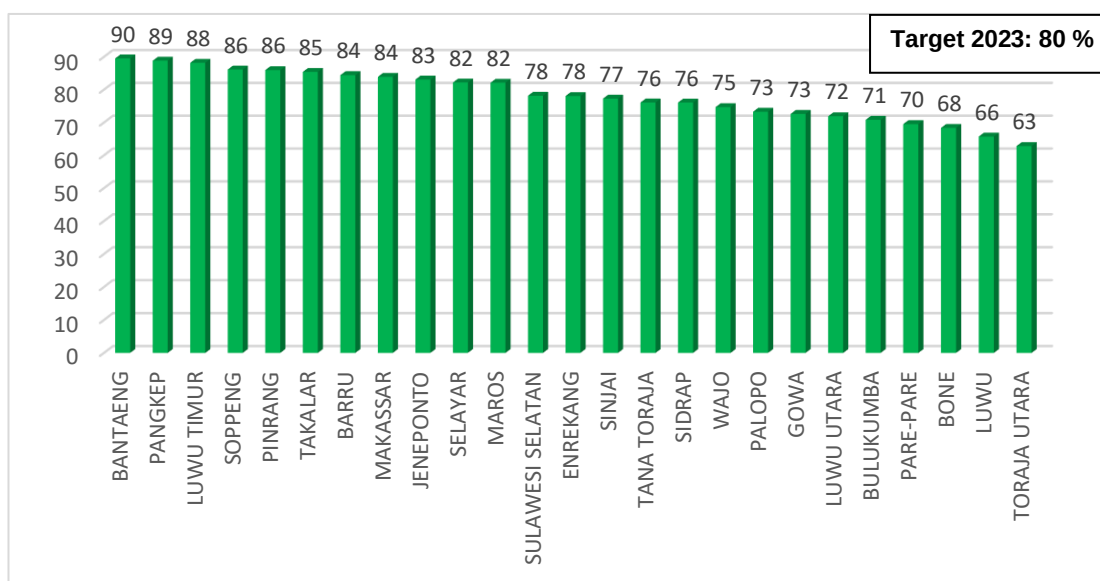
Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyebutkan bahwa intervensi penanggulangan stunting mencakup intervensi sensitif yang dilakukan oleh lintas sektor dan intervensi spesifik yang dilaksanakan oleh sektor Kesehatan. Menurut "The Lancet" (2021) Penanggulangan stunting melalui intervensi gizi spesifik pada 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) terbukti efektif dan berkontribusi 30% dalam menurunkan prevalensi stunting, jika cakupan intervensi gizi

spesifik tersebut mencapai minimal 90% sedangkan intervensi sensitive yang melibatkan berbagai sektor selain Kesehatan berkontribusi 70% dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Intervensi spesifik pencegahan stunting meliputi pencegahan terjadinya masalah gizi pada ibu hamil dan balita, mulai dari menjaga kesehatan dan status gizi ibu saat sebelum dan selama kehamilan, dilanjutkan pada masa menyusui, semua bayi mendapat ASI eksklusif, semua baduta (bawah dua tahun) mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) tinggi protein hewani serta memastikan setiap anak balita mengkonsumsi makanan keluarga dengan nilai gizi yang sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Dibawah ini adalah prevalensi capaian indikator spesifik pencegahan stunting :

Grafik III.8

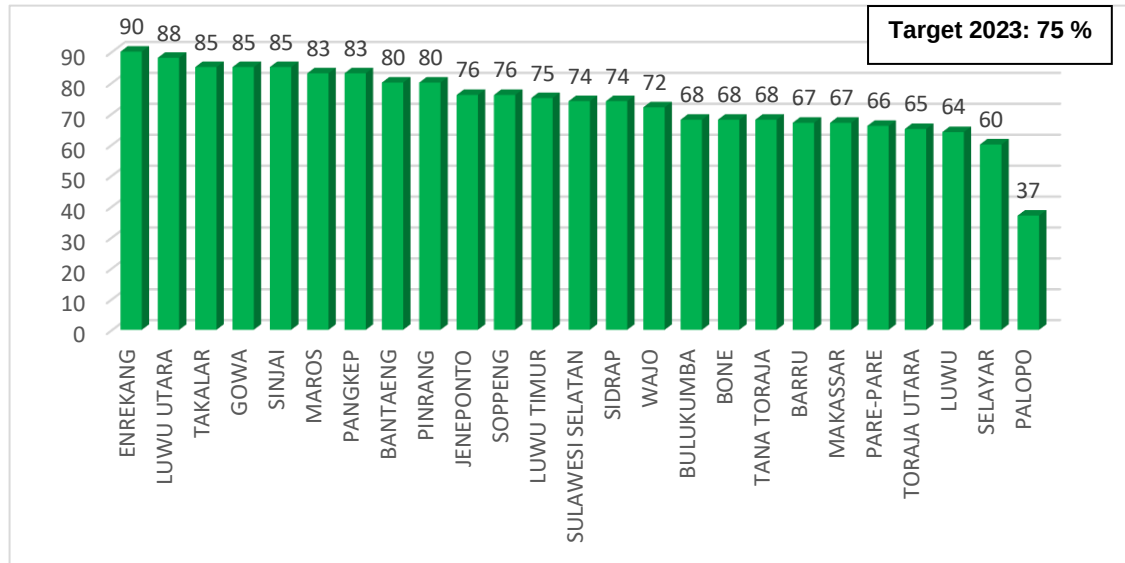
**PERSENTASE ANAK USIA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG DI POSYANDU (D/S)
DI 24 KAB/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



Sumber : www.sigiziterpadu.kemkes.go.id

Dari Grafik diatas, terlihat bahwa untuk capaian D/S Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah 78 %. Angka ini belum mencapai target nasional yaitu 80% terdapat 13 Kabupaten/Kota belum mencapai target dan 11 kabupaten/Kota sudah mencapai target. Kabupaten yang capaiannya tertinggi adalah kabupaten Bantaeng 90% dan terendah adalah kabupaten Toraja utara 63%.

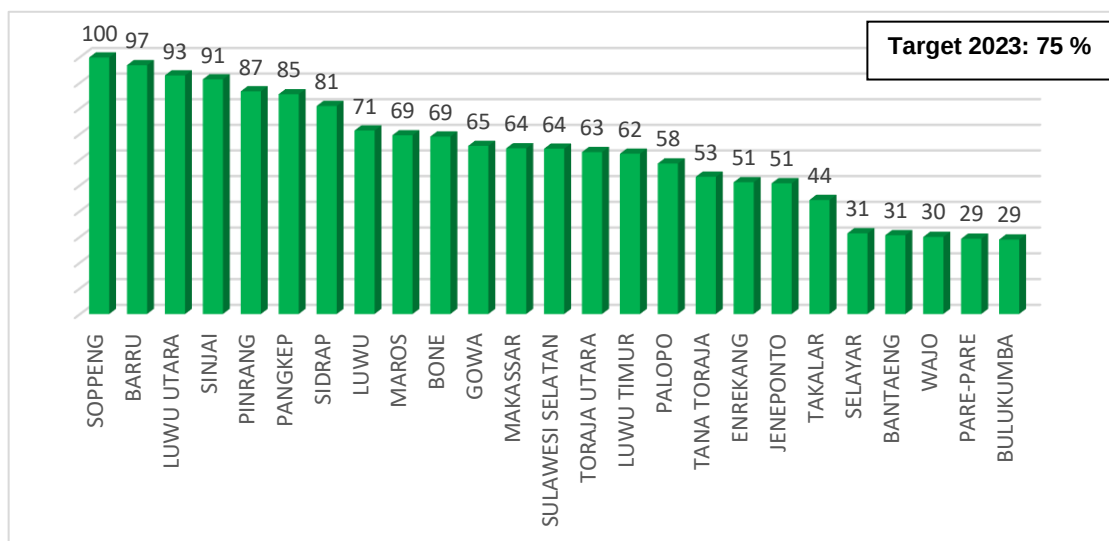
Grafik III.9
**CAKUPAN ASI EKSKLUSIF ANAK USIA 0-6 BULAN
DI 24 KAB/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



Sumber : www.sigiziterpadu.kemkes.go.id

Dari gambar diatas dapat diketahui prevalensi capaian ASI Eksklusif provinsi Sulawesi selatan tahun 2023 yaitu 74,0 %. Angka ini belum mencapai target nasional tahun 2023 yaitu 75%. Terdapat 12 kabupaten/kota yang belum mencapai target dan 12 Kab/Kota telah mencapai target, Kabupaten tertinggi yaitu Enrekang 90% dan terendah yaitu palopo 37%.

Grafik III.10
**CAKUPAN REMAJA PUTERI MENKONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH
DI 24 KAB/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



Sumber : www.sigiziterpadu.kemkes.go.id

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 dari 24 Kab/Kota terdapat 7 Kab/kota yang telah mencapai target Konsumsi tablet tambah darah dan 17 Kabupaten/kota yang belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Dari hasil evaluasi di atas, selanjutnya dipaparkan faktor penyebab keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan yang dilakukan, sebagai berikut :

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Belum semua RS baik di Provinsi maupun RSUD di Kabupaten/Kota melaksanakan audit Medik/Audit klinik baik kematian maternal maupun kematian perinatal untuk penelusuran penyebab kematian. Rekomendasi perbaikan hasil pengkajian Audit Maternal dan Perinatal di Kabupaten/Kota belum seluruhnya direspon oleh pemerintah daerah
2. Faktor keterlambatan pengambilan keputusan keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan berimbas pada terlambatnya penanganan . Selain itu adanya faktor 4 T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat Jarak Kehamilan dan Terlalu banyak anak) yang menambah tingkat resiko tinggi kehamilan.
3. Distribusi dan mobilitas tenaga kesehatan terlatih dengan kompetensi penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal dan tenaga gizi belum merata, proses mutasi yang sering terjadi utamanya pada Puskesmas di daerah non perkotaan, sehingga menyebabkan permasalahan sama di setiap tahun dari sisi jumlah tenaga kesehatan tidak merata secara proporsional, tugas rangkap bagi petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan profesinya.
4. Sistem rujukan maternal neonatal dirasakan belum berjalan optimal dari sisi efektifitas waktu penanganan khususnya pada kasus-kasus dengan status kegawatdaruratan tinggi.
5. Sarana prasarana penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di kabupaten/kota belum maksimal, baik dari sisi daya tampung, ketersediaan ruang NICU, bank darah maupun alat kesehatan serta teknologi pendukung.

6. Belum optimalnya semua sektor berperan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga beban tanggung jawab dirasa hanya pada OPD teknis yang bersangkutan langsung sehingga pencapaian sasaran kurang maksimal. Pemerintah Daerah diharapkan secara sinergi melakukan monitoring dan evaluasi ke Fasilitas Kesehatan sehingga dapat melihat kondisi lapangan pelayanan kesehatan.
7. Kondisi geografis pada beberapa desa lokus yang berada di wilayah sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya kegiatan pendampingan gizi dan akses mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil .
8. Kurangnya asupan makanan bergizi dan infeksi berulang dalam jangka waktu tertentu (kronis). Selain itu adanya penyakit infeksi dan penyakit penyerta yang merupakan dampak dari kekurangan gizi dalam jangka waktu lama berpengaruh terhadap kondisi kesehatan ibu, ibu hamil dan balita. Selain itu kondisi kesehatan lingkungan sekitar yang tidak sehat juga berperan menyebabkan munculnya penyakit infeksi.
9. Disparitas permasalahan gizi yang terjadi antar wilayah di Sulawesi Selatan sehingga dibutuhkan perencanaan program berbasis spesifik local.
10. Faktor ekonomi yang berpengaruh pada penyediaan pangan keluarga dan pengambilan keputusan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas antara lain:

1. Pembentukan Tim AMP-SR *Audit Maternal dan Perinatal Surveillans Respon*s di Kabupaten Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, selanjutnya diharapkan hasil audit yang dilakukan dapat dikawal dan dikoordinasikan kepada pemerintah setempat sehingga respon cepat dalam penanganan kasus-kasus maternal perinatal segera ditindaklanjuti.
2. Peningkatan promosi kesehatan, deteksi dini, surveilans epidemiologi dan gizi. Selain itu peningkatan edukasi dan pemberdayaan keluarga serta pengaktifan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
3. Pembatasan mutasi untuk pegawai yang sudah terlatih. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan menganalisis kebutuhan tenaga kesehatan di daerahnya dan pelaksanaan distribusi secara proporsional sebagai tindak lanjut audit maternal, perinatal dan kajian di sektor gizi masyarakat.

4. Optimalisasi pelaksanaan sistem regulasi rujukan maternal neonatal dengan fokus perbaikan pada sisi permasalahan sehingga kasus-kasus dengan status kegawatdaruratan tinggi secara efektif dan efisien dapat tertangani sesuai SOP.
5. Pemenuhan sarana prasarana penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal dengan mendahulukan locus prioritas fasilitas pemberi layanan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan letak geografis kewilayahan.
6. Sinergitas lintas program/sektor terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang melibatkan program kesehatan serta perlunya kesepakatan yang diperkuat dengan regulasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan.
7. Perbaikan infrastruktur pada beberapa desa lokus yang berada diwilayah sulit dijangkau sehingga memungkinkan akses pendampingan gizi pelayanan kesehatan.
8. Intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang (kurus).
9. Pelaksanaan program 11 intervensi spesifik percepatan penurunan stunting
10. Pemberian stimulan baik berupa material atau pendidikan keterampilan yang mendukung terbukanya peluang kerja bagi masyarakat tidak mampu.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA. 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini sebesar Rp 199.529.469.029,- dengan realisasi sebesar Rp 152.619.963.576,67,- atau 76,49%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 58,50%, maka tidak terdapat efisiensi pada penggunaan sumber daya. Bila dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap persentase fisik pelaksanaan program/kegiatan, dimana rata-rata persentase realisasi fisik program pendukung sasaran ini sebesar 90,97% dibandingkan dengan persentase keuangan sebesar 76,49%, maka terdapat efisiensi sebesar 18,93%.

Tabel III.14
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 1**

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU	% FISIK	EFISIENSI
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	196.628.860.329,-	150.659.376.376,67,-	76,62%	91,84%	19,86%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.368.576.000,-	911.415.500,-	66,60%	85%	27,64%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	163.456.700,-	137.756.200,-	84,28%	100%	18,66%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.368.576.000,-	911.415.500,-	66,60%	85%	27,64%
	JUMLAH	199.529.469.029,-	152.619.963.576,67,-	76,49%	90,97%	18,93%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat didukung sebanyak 4 program, 9 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

➤ **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Untuk mendukung sasaran ini terdapat 3 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 196.628.860.329,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 150.659.376.376,67,- atau 76,62% dan realisasi fisik 91,84%.

Hasil pencapaian indikator kinerja program, antara lain :

- Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan (prioritas) dengan target sebesar 100% dan realisasi 33,33%.

- Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dengan target sebesar 7,50% dan Realisasi 5,30%.
- Persentase Ibu Hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Target Renstra dengan target sebesar 13% dan realisasi 9,90%.
- Persentase Penduduk/Warga pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM), dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.
- Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebesar 100% dan realisasi 100%.
- Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi dengan target sebesar 100% dan Realisasi 86,40%.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator yaitu cakupan ketersediaan sarana prasarana dan alkes UKP dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 174.104.150.553,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 138.311.822.361,67,- atau 79,44%, dan realisasi fisik 99.97% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:100 dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit. Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 162.273.121.913,- dengan realisasi keuangan Rp 127.330.240.757,67,- atau 78,47% dan realisasi fisik 100%.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan yang disediakan yang diadakan dengan target 1021 unit dan realisasi 0 paket (0%).
Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 0,- dengan realisasi keuangan Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0%

- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana di fasilitas layanan Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan yang tersedia dengan target 1063 unit dan realisasi 1063 unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 250.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 100.000.000,- atau 40% dan realisasi fisik 100%.
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan Alat-alat kesehatan /peralatan laboratorium Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah alat-alat Kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan yang tersedia dan terpelihara dengan target 25 unit dan realisasi 25 unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 87.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik 100%.
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas layanan kesehatan. Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara dengan target 14 unit dan realisasi 12 unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 274.080.500,- dengan realisasi keuangan Rp 201.860.300,- atau 73,65% dan realisasi fisik 80%.
- 6) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya. Indikator Sub Kegiatan Jumlah dokumen distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%) Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 742.387.000,- dengan realisasi keuangan Rp 722.940.170,- atau 97,38% dan realisasi fisik 100%.
- 7) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya. Indikator Sub Kegiatan jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya yang tersedia dengan target 3 paket dan realisasi 3 paket (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 10.477.061.140,- dengan realisasi keuangan Rp 9.956.781.134,- atau 95,03% dan realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator Capaian Kegiatan Cakupan Cakupan layanan Kesehatan UKP dan UKM Rujukan dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 22.005.660.076,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.049.350.715,- atau 54,76%, dan realisasi 82,50% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi Bencana. Indikator Sub Kegiatan jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Kesehatan pada kondisi KLB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dengan target 91.015 orang dan realisasi 32.829 orang (36,06%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 604.438.000,- dengan realisasi keuangan Rp 38.976.000,- atau 6,45% dan realisasi fisik 100%.
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB). Indikator Sub Kegiatan Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Kesehatan pada kondisi KLB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dengan target 3.826 orang dan realisasi 1.092 orang (28,54%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 513.140.600,- dengan realisasi keuangan Rp 117.475.600,- atau 22,89% dan realisasi fisik 100%.
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 2.422.641.000,- dengan realisasi keuangan 1.001.867.500,- atau 41,35% dan realisasi fisik 55%.
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Usia Lanjut. Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 688.179.000,- dengan realisasi keuangan Rp 72.392.500,- atau 10,52% dan realisasi fisik 80%.

- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 11.383.535.460,- dengan realisasi keuangan Rp 6.582.016.225,- atau 57,82% dan realisasi fisik 100%.
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.088.040.000,- dengan realisasi keuangan Rp 1.012.029.250,- atau 93,01% dan realisasi fisik 100%.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 267.860.000,- dengan realisasi keuangan Rp 230.763.000,- atau 86,15% dan realisasi fisik 100%.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional ,akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya. Indikator Sub Kegiatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya dengan target 1 dokumen dan realisasi 0 dokumen (0%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.052.079.700,- dengan realisasi keuangan Rp 49.273.950,- atau 4,68% dan realisasi fisik 100%.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.223.464.000,- dengan realisasi keuangan Rp 840.737.890,- atau 68,72% dan realisasi fisik 85%.

- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan haji.
Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan haji dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 170.886.700,- dengan realisasi keuangan Rp 121.084.300,- atau 70,86% dan realisasi fisik 100%.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK). Indikator Sub Kegiatan Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp Rp 214.710.200,- dengan realisasi keuangan Rp 186.907.400,- atau 87,05% dan realisasi fisik 90%.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA. Indikator Sub Kegiatan Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis dengan target 130 Orang dan realisasi 128 orang (98,46%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.286.397.800,- dengan realisasi keuangan Rp 1.267.765.000,- atau 98,55% dan realisasi fisik 100%.
- 13) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 153.349.400,- dengan realisasi keuangan Rp 96.804.400,- atau 63,13% dan realisasi fisik 70%.
- 14) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan.
Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 307.974.600,- dengan realisasi keuangan Rp 25.955.000,- atau 8,43% dan realisasi fisik 20%.
- 15) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan.
Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 575.663.616,- dengan realisasi keuangan Rp 400.802.700,- atau 69,62% dan realisasi fisik 80%.

16) Sub Kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian obat Massal oleh Kabupaten/Kota. Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian Obat massal oleh Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 53.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp 4.500.000,- atau 8,44% dan realisasi fisik 20%.

3. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Indikator Capaian Kegiatan Persentase Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan dengan target 100% penduduk dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 519.049.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 298.203.300,- atau 57,45%, dan realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit.

Indikator Sub Kegiatan jumlah RS yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar dengan target 31 unit dan realisasi 31 unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 394.024.200,- dengan realisasi keuangan Rp 281.572.800,- atau 71,46% dan realisasi fisik 100%.

2) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

Indikator Sub Kegiatan jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan dengan target 31 unit dan realisasi 31 unit (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 125.025.500,- dengan realisasi keuangan 16.630.500,- atau 13,30% dan realisasi fisik 100%.

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp 1.368.576.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 911.415.500,- atau 66,60%, dan realisasi fisik 78,28% dengan indikator capaian program yaitu Rasio Tenaga Kesehatan persatuan penduduk (Prioritas) dengan target sebesar 23 per 100.000 Penduduk dan Realisasi 23,97 per 100.000 Penduduk (104,22%) yang didukung oleh 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan kebutuhan sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi. Indikator Capaian Kegiatan Cakupan Pemenuhan SDM di Unit Pelayanan Kesehatan dengan target 100% dan realisasi 80% (80%).
Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 186.563.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 172.000.000,- atau 92,19%, dan realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan sumber daya Manusia Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dengan target 27.510 orang dan realisasi 15.952 orang (57,99%).Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 186.563.000,- dengan realisasi keuangan Rp 172.000.000,- atau 92,19% dan realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Provinsi. Indikator Capaian Kegiatan Cakupan Peningkatan kompetensi Teknis Tenaga SDM dengan target 100% dan realisasi 80% (80%). Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 1.182.013.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 739.415.500,- atau 62,56%, dan realisasi fisik 74,85%. dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan.
Indikator Sub Kegiatan jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi yang meningkat dengan target 564 orang dan realisasi 2.964 orang (525,53%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 199.004.000,- dengan realisasi keuangan Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0%.
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan target 5 dokumen dan realisasi 5 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 983.009.000,- dengan realisasi keuangan Rp 739.415.500,- atau 75,22% dan realisasi fisik 90%.

➤ **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp 163.456.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 137.756.200,- atau 84,28%, dan realisasi fisik 100% dengan indikator capaian Program Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi Alat kesehatan dan makanan dan minuman sesuai standar dengan target sebesar 95% dan Realisasi 99,8% (105,05%) yang didukung oleh 1 kegiatan sebagai berikut :

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penerbitan pengakuan pedagang besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang penyalur alat kesehatan (PAK). Indikator Capaian sub kegiatan Persentase Pengakuan pedagang besar Farmasi Cabang dan cabang Penyalur alat kesehatan (PAK) dengan target 100% dan realisasi 100%. Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 163.456.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 137.756.200,- atau 84,28%, dan realisasi fisik 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK. Indikator Sub Kegiatan jumlah PBF cabang dan cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan perizinan dengan target 189 sarana dan realisasi 189 sarana (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 105.868.700,- dengan realisasi keuangan Rp 82.171.000,- atau 77,62% dan realisasi fisik 100%.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan data perizinan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik. Indikator Sub Kegiatan jumlah data perizinan pengakuan PBF cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan cabang PAK berbasis elektronik dengan target 5 dokumen dan target 5 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp 57.588.000,- dengan realisasi keuangan Rp 55.585.200,- atau 96,52% dan realisasi fisik 100%.

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp 3.322.089.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.969.875.890,- atau 59,30%, dan realisasi fisik 93,83% dengan indikator capaian program Persentase Kabupaten /Kota yang memiliki kebijakan PHBS dengan target sebesar 85% dan Realisasi 87,50% (102,94%) yang didukung oleh 3 kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah Provinsi. Indikator sub kegiatan Cakupan Pelaksanaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta Masyarakat dengan target 100% dan realisasi 100%.

Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 143.101.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 128.870.590,- atau 90,06%, dan realisasi fisik 100%. dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Provinsi. Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil advokasi Kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta Masyarakat dan lintas sektor Tingkat daerah provinsi dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini Rp 143.101.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 128.870.590,- atau 90,06%, dan realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotive preventif Tingkat daerah provinsi. Indikator sub kegiatan tersebarluasnya informasi PHBS melalui berbagai media dengan target 100% dan realisasi 100%.

Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 2.154.948.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.257.160.700,- atau 58,34%, dan realisasi fisik 100%. dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan penyelenggaraan promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini Rp 2.154.948.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.257.160.700,- atau 58,34%, dan realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah provinsi. Indikator sub kegiatan cakupan pengembangan Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) dengan target 100% dan realisasi 100%.

Alokasi anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp 1.024.039.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 583.844.600,- atau 57,01%, dan realisasi fisik 80%. dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan bimbingan teknis dan supervise UKBM. Indikator Sub Kegiatan jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervise UKBM dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Alokasi anggaran pada Sub Kegiatan ini Rp 1.024.039.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 583.844.600,- atau 57,01%, dan realisasi fisik 80%.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan anggaran dilakukan beberapa hal antara lain :

- a) Monitoring tidak langsung melalui pelaporan rutin (bulanan dan triwulan).
- b) Monitoring langsung melalui pertemuan evaluasi dan monitoring yang juga dilaksanakan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan).

Berikut penyajian Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pembangunan di bidang kesehatan :

a. Kondisi Pendapatan Daerah

1. Dinas Kesehatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 40.152.000,- dengan realisasi sebesar Rp 40.152.000,- (100%), yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, dengan perincian sebagai berikut :

- Retribusi Penyewaan Tanah
Dengan target pendapatan sebesar Rp 9.972.000,- dan realisasi sebesar Rp 9.972.000,- (100%).
- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
Dengan target pendapatan sebesar Rp 30.180.000,- dan realisasi sebesar Rp 30.180.000,- (100%).

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum dan Layanan BLUD di UPT

Rekapitulasi pendapatan jasa layanan umum dan layanan BLUD di UPT lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 229.983.968.753,- dengan realisasi sebesar Rp 222.476.319.031,- (96,73%), dengan perincian sebagai berikut :

- a. UPT RSUD Haji, dengan target pendapatan sebesar Rp 47.922.452.152,- dan realisasi sebesar Rp 52.539.895.871,- (109,64%).
- b. UPT RSUD Labuang Baji Makassar, dengan target pendapatan sebesar Rp 67.042.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 49.705.865.076,- (74,14%).
- c. UPT RSKD Dadi, dengan target pendapatan sebesar Rp 44.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 49.103.372.511,54,- (111,60%).
- d. UPT RSUD Sayang Rakyat, dengan target pendapatan sebesar Rp 15.640.024.600,- dan realisasi sebesar Rp 17.124.387.639,07,- (109,49%).
- e. UPT RSKDIA Pertiwi, dengan target pendapatan sebesar Rp 13.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 13.297.756.597,- (102,29%).
- f. UPT RSKDIA Sitti Fatimah, dengan target pendapatan sebesar Rp 13.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 12.672.166.877,- (93,87%).
- g. UPT RSKD Gigi dan Mulut, dengan target pendapatan sebesar Rp 9.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 9.974.753.856,- (105%).
- h. UPT RSUD Regional La Mappapening, dengan target pendapatan sebesar Rp 2.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 975.726.508,78,- (39,03%).
- i. UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah (Labkesda), dengan target pendapatan sebesar Rp 5.879.492.001,- dan realisasi sebesar Rp 5.734.854.395,- (97,54%)
- j. UPT Transfusi Darah, dengan target pendapatan sebesar Rp 11.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 11.347.539.700,- (103,16%).

b. Situasi Anggaran Tahun 2023

Dalam pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mendukung dalam pencapaian kinerja. Gambaran situasi anggaran kesehatan dan sumber pendanaan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT/UPK selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.15
**SITUASI ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JENIS ANGGARAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% KEU.	% FISIK	EFISIENSI
1.	Dinas Kesehatan	303.471.847.277,-	251.057.576.743,-	82,73%	93,55%	13,07
	a. APBN/ Dekonsentrasi	15.345.166.000,-	13.094.148.444,-	85,33%	92,95%	
	b. APBD-P Provinsi & UPT RSUD Regional La Mappapening Bone (Masuk dalam DPPA Dinas Kesehatan tahun 2023)	288.126.681.277,-	237.963.428.298,67,-	82,59%	94,15%	
2.	UPT RSKD Dadi	128.927.586.978,-	124.168.925.838,-	96,31%	100%	3,69
3.	UPT RSU Haji	125.308.404.564,-	122.390.201.024,-	97,67%	99,79%	2,12
4.	UPT RSU Labuang Baji	162.890.187.190,-	160.547.443.582,-	98,56%	100%	1,44
5.	UPT RSU Sayang Rakyat	55.390.332.924,-	54.462.412.007,-	98,32%	100%	1,68
6.	UPT RSKDIA Pertiwi	39.256.981.690,-	38.627.494.174,-	98,40%	100%	1,60
7.	UPT RSKDIA Siti Fatimah	37.088.930.170,-	34.981.438.565,-	94,32%	100%	5,68
8.	UPT RSK Gigi dan Mulut	15.281.676.898,-	11.795.366.151,-	77,19%	100%	22,81
9.	UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Daerah	8.613.153.494,-	7.541.051.741,-	87,55%	97,12%	9,85
10	Unit Transfusi Darah	12.178.770.426,-	9.658.270.496,-	79,30%	98,96%	19,86
TOTAL		884.407.871.611,-	821.230.180.321,-	92,44%	98,94%	7,03

Bila dilihat dari tabel di atas efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Prov. Sulsel dan UPT dengan membandingkan antara realisasi rata-rata capaian kinerja program/kegiatan dengan realisasi anggaran di tahun 2023 adalah sebesar 7,03%, dengan cara perhitungan tingkat efisiensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Capaian kinerja} - \text{Capaian Realisasi Anggaran}}{\text{Capaian Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{98,94\% - 92,44\%}{92,44} \times 100\% \\
 &= 7,03\%
 \end{aligned}$$

c. Realisasi Anggaran APBN/Dekonsentrasi

Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan juga didukung oleh Anggaran APBN/Dekonsentrasi dengan total alokasi anggaran di Tahun 2023 sebesar Rp 15.345.166.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 13.094.148.444,- (85,33%) dan realisasi fisik 92,95%, yang didukung oleh 5 Program, sebagai berikut :

1) Program Dukungan dan Manajemen

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.874.004.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.788.889.300,- (95,46%) dan realisasi fisik 100%.

2) Program Kesehatan Masyarakat

Alokasi anggaran sebesar Rp 5.498.436.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.205.340.500,- (76,48%) dan realisasi fisik 80,63%.

3) Program Pencegahan Pengendalian Penyakit

Alokasi anggaran sebesar Rp 3.992.378.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.634.773.957,- (91,04%) dan realisasi fisik 97,86%.

4) Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Alokasi anggaran sebesar Rp 2.179.998.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.835.564.687,- (84,20%) dan realisasi fisik 86,25%.

5) Program Pelatihan dan PendidikanVokasi

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.800.350.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.629.580.000,- (90,51%) dan realisasi fisik 100%.

BAB IV

P E N U T U P

A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan (SDMK), Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Penyediaan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya di atas, maka kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam kriteria penilaian kinerja **Tinggi (T)**. Hasil evaluasi sasaran menunjukkan rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 70,78% dan rata-rata pencapaian indikator sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 76,83% yang diukur melalui dua sasaran dan 5 indikator kinerja, dimana 2 indikator memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**, 2 indikator memenuhi kriteria **Sedang** dan 1 indikator memenuhi kriteria **Rendah**. Sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel IV.1
SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

N O	INDIKATOR	NILAI CAPAIAN	KRITERIA
1.	Nilai SAKIP OPD	108,64%	Sangat Tinggi (ST)
2.	Persentase Temuan Material	100%	Sangat Tinggi (ST)
3.	Angka Kematian Ibu	67,67%	Sedang (S)
4.	Angka Kematian Bayi	40%	Rendah (R)
5.	Prevalensi Balita Stunting	67,85%	Sedang (S)
Rata-rata Capaian		76,83%	Tinggi (T)

B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Permasalahan kesehatan dirasakan masih menjadi tanggungjawab sektor kesehatan saja, sedangkan seharusnya menjadi perhatian bersama sehingga menjadi lebih efektif dalam menindaklanjuti masalah tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja yang dijabarkan di bab sebelumnya beberapa langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan antara lain :

1. Percepatan pelaksanaan pelaporan kinerja dengan mengembangkan teknologi informasi melalui aplikasi pelaporan sektoral secara berjenjang di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT.
2. Integritas dan penegasan komitmen bersama dalam pelaksanaan SAKIP/RB sehingga pencapaian kinerja lebih optimal.
3. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pengambilan kebijakan dalam peningkatan capaian kinerja.
4. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan khususnya pada pelaksanaan program prioritas.
5. Melakukan evaluasi hasil audit maternal dan neonatal yang selanjutnya segera dikoordinasikan kepada pemerintah setempat sehingga respon cepat dalam penanganan kasus-kasus maternal dan neonatal segera ditindaklanjuti.
6. Peningkatan promosi kesehatan, deteksi dini, surveilans epidemiologi dan gizi. Selain itu peningkatan edukasi dan pemberdayaan keluarga serta pengaktifan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam rangka penurunan prevalensi balita stunting.
7. Distribusi secara proporsional dan pembatasan mutasi untuk tenaga kesehatan yang sudah terlatih khususnya dokter spesialis. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan menganalisis kebutuhan tenaga kesehatan di daerahnya dan pelaksanaan distribusi secara proporsional sebagai tindak lanjut audit maternal, perinatal dan kajian di sektor gizi masyarakat.
8. Sinergitas lintas program/sektor terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang melibatkan program kesehatan serta perlunya kesepakatan yang diperkuat dengan regulasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini kami jabarkan sebagai pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kepada publik dan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih maksimal.

Makassar, 12 Februari 2024



**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Drs. H. M. ISHAQ ISKANDAR, M.Kes, MM, MH

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 19720522 200012 1 004

Lampiran 1 : Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran PK Tahun 2023

**MATRIKS PENGUKURAN PERJANJIAN KINERA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	HASIL CAPAIAN TARGET (%)	PERSENTASE CAPAIAN (%)	KRITERIA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7	8	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP OPD	Persen (%)	80	88	108,64	Sangat Tinggi (ST)	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 oleh Tim Inspektorat (APIP) Provinsi
		2	Persentase Temuan Material	Persen (%)	1	0	100	Sangat Tinggi (ST)	
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup/KH	91	133	67,67	Sedang (S)	
		2	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup/ KH	5	10	40	Rendah (R)	
		3	Prevalensi Balita Stunting	Persen	21,59	27,4	67,85	Sedang (S)	
RATA RATA NILAI PENCAPAIAN KINERJA IKU							76,83%	Tinggi (T)	

Lampiran 2 : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Telp. (0411) 586 452 Fax (0411) 586 451
M A K A S S A R 90245

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **ANDI SUDIRMAN SULAIMAN**
Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini berdasarkan ekspektasi khusus pimpinan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

GOVERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA DINAS

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP OPD	81%
		- % Temuan Material	0%
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	- Angka Kematian Ibu	90/100.000 Kelahiran Hidup
		- Angka Kematian Bayi	4/1.000 Kelahiran Hidup
		- Prevalensi Balita Stunting	18,59%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	SUMBER DANA
1.	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 176.249.439.624	4 Kegiatan	APBD & DAK
2.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 13.288.399.858	2 Kegiatan	APBD
3.	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 532.598.250	1 Kegiatan	APBD & DAK
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 3.472.900.400	3 Kegiatan	APBD & DAK
5.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 73.459.615.356	8 Kegiatan	APBD
TOTAL		Rp. 267.002.953.488	18 Kegiatan	

Makassar, Januari 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA DINAS


ANDI SUDIRMAN SULAIMAN


dr. HJ. ROSMINI PANDIN, MARS



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl. Pahlawan Kemerdekaan Km. 11 Telp : (0411) 586451, Fax : (0411) 586393

Makassar 90245

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 440.1.2/11482/Diskes

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urutan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,


Dr. H. M. ICHSAN MUSTARI, M.H.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660217 199803 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NOMOR : 440.1.2 / 11482 / Diskes

TANGGAL : 27 Oktober 2020

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	Penanggungjawab
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Proyeksi berdasarkan hasil pencapaian UHH tahun sebelumnya	Dinkes Provinsi Sulsel; BPS (Badan Pusat Statistik)	Semua Bidang terkait
	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama di kali 100.000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)	Bidang Kesmas
	Angka Kematian Bayi	/ 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi (usia 0 - 11 bulan) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi dengan Jumlah Kelahiran hidup selama Periode yang sama di kali 1.000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)	Bidang Kesmas
	Prevalensi Balita Stunting	Persentase (%)	Hasil Survei Nasional	Dinkes Provinsi Sulsel; Riskesdas; PSG	Bidang Kesmas

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

dr. H. M. ICHSAN MUSTARI, M.H.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda